

PERTANAHAN DAN KEPOLISIAN PALING BANYAK DIADUKAN

Rabu, 24 Februari 2021 - Fikri Mustofa

JEMBER, RADARJEMBER.ID - Tiap tahun, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menerima ratusan pengaduan terkait dugaan mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan pada 2020 lalu, tercatat 408 pengaduan.

Hal itu dikatakan oleh Agus Mutaqin, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Menurutnya, pengaduan tersebut berasal dari warga karena selama ini merasa tidak puas terhadap pelayanan publik. "Dari ratusan pengaduan itu paling banyak terkait pertanahan. Selain itu pengaduan pelayanan di institusi kepolisian dan pelayanan kependudukan, serta perizinan," ungkapnya.

Mantan Redaktur Jawa Pos usai mengikuti deklarasikan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), serta pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) se-Tapal Kuda, bertempat di Aula Lapas Kelas II A Jember, Selasa (23/2).

Dengan dikukuhkan Satopspatnal ini, diharapkan zero pengaduan di Ombudsman Jawa Timur. "Jadi jangan dilaporkan dahulu kepada kami, tapi diselesaikan ke pengaduan internal terlebih dulu. Karena tiap satuan kerja terdapat Satopspatnal dan bila belum ada jalan keluar barulah diadukan ke Ombudsman," tambah Agus.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu optimistis zero pengaduan di Ombudsman Jawa Timur akan tercapai. Apalagi deklarasi ini merupakan tahap awal pencapaian WBK dan WBBM.